

# **Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pendekatan *Community Based Education***

*Rini Werdiningsih*  
[rini-werdi@untagsmg.ac.id](mailto:rini-werdi@untagsmg.ac.id)

## **ABSTRACT**

Educational institutions as a tool that is able to hone and direct the potential of children as a provision of life in the community later. The perception developed so far is that the responsibility for the education process is still borne by educational institutions. Community involvement in the realization and delivery of education is often ignored. In fact, in terms of providing education, the community has the right and responsibility to carry out community-based education based on religious, social, cultural, aspirational, and community potentials as an embodiment of education from, by and for the community.

The focus of this study is to examine the role of the community in education including the participation of individuals, groups, families in the administration and quality control of educational services. The community can participate as a source, implementer, and user of educational outcomes. This research uses a qualitative approach, which refers to phenomenology. Determination of research subjects was chosen based on purposive sampling. Data collection is done by in-depth interview techniques, observation, and documentation. The results showed: community participation in improving quality includes participation in voluntary forms, decision making, thinking and financing

***Keywords,; Community Based Education, Education Quality***

## ABSTRAK

Lembaga Pendidikan sebagai sarana yang mampu mengasah dan mengarahkan potensi anak sebagai bekal kehidupan di masyarakat kelak. Persepsi yang terbangun selama ini adalah bahwa tanggungjawab proses pendidikan masih dibebankan pada institusi pendidikan saja. Keterlibatan masyarakat dalam perwujudan dan penyelenggaraan pendidikan seringkali diabaikan. Padahal, dalam hal penyelenggaraan pendidikan, masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat ( *Community based education*) berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat

Fokus penelitian ini adalah mengkaji Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada fenomenologis. Penentuan subyek penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu antara lain partisipasi bentuk sukarela, pengambilan keputusan, pemikiran dan pembiayaan

***Kata kunci: Community Based Education, Mutu Pendidikan***

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan dipandang sebagai sarana yang mampu mengasah dan mengarahkan potensi anak sebagai bekal kehidupan di masyarakat kelak. Pendidikan sekolah dipandang sebagai sarana yang mampu mengintegrasikan kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotorik anak.<sup>1</sup> Kesalahan persepsi dalam penyelenggaraan pendidikan hingga saat ini adalah bahwa tanggungjawab proses pendidikan masih dibebankan pada institusi pendidikan saja. Pihak-pihak diluar institusional pendidikan seperti masyarakat seringkali tidak dilibatkan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif dan edukatif bagi anak. Masyarakat diabaikan perannya dalam perwujudan dan penyelenggaraan pendidikan.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dicantumkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masyarakat sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan serta memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis pada masyarakat yaitu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.<sup>2</sup>

Hubungan masyarakat dan sekolah adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat bisa dilihat dari dua aspek, yakni aspek kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat. Aspek kepentingan sekolah, hubungan ini mampu memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, memperlancar kegiatan belajar mengajar dan memperoleh bantuan serta dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah. Sedangkan aspek kebutuhan masyarakat, tujuan hubungan antara sekolah

---

<sup>1</sup> Samsul Maarif, et al., *School Culture di Madrasah dan Sekolah*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 2

<sup>2</sup> Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dan masyarakat adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil serta makin meningkatkan kemampuannya.

Pada Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diungkapkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan sangatlah diperlukan. Demi perkembangan dan pelaksanaan pendidikan yang optimal dan dapat memenuhi apresiasi dan kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat haruslah dipertimbangkan secara matang dalam hal konsep dan implementasinya.

Selain itu, krisis multidimensi yang melanda Indonesia belakangan ini, memberi momentum terjadinya perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan, termasuk kehidupan pendidikan. Saat ini, krisis multidimensi pengaruhnya terhadap kehidupan pendidikan amat besar. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan daya dan dana pendidikan amat menurun. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk melibatkan masyarakat dan sekolah dalam mengelola pendidikan agar kualitas pendidikan tetap optimal.

Pertanyaannya adalah:

Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan *Community Based Education* ?

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pendidikan Berbasiskan Masyarakat**

Menurut Comton dan Mc Clusky (dalam Sumpeno, 2009), pendidikan berbasis masyarakat adalah proses di mana setiap anggota masyarakat hadir untuk mengemukakan setiap persoalan dan kebutuhan, mencari solusi mengerahkan daya yang tersedia, dan melaksanakan kegiatan atau pembelajaran, atau keduanya. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat adalah salah satu model pendidikan yang mana masyarakat menjadi tumpuan kekuatan pada pendidikan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 butir 38 dijelaskan bahwa Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan

pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Dari dua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah suatu proses penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan pada kehidupan masyarakat yang mengemukakan setiap persoalan dan kebutuhan dalam kehidupan dimasyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Masyarakat dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat bertumpu pada tiga pilar utama yaitu “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan merupakan jawaban terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat merupakan pelaku atau subyek pendidikan yang aktif, bukan hanya sekadar obyek pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka.

Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan implemementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat.

### **Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan implemementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa PBM adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (pasal 54 ayat 1).<sup>3</sup>

Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2). Oleh karena itu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan (pasal 55 ayat 1 dan 2). Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan/atau sumber lain (pasal 55 ayat 3).<sup>4</sup>

Secara umum, pendidikan seringkali dipandang sebagai penanaman modal jangka panjang yang harus mampu membekali anak didik untuk menghadapi masa depannya. Pendidikan harus mampu mencerahkan anak didik dari keadaan tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu membuat anak didiknya berhasil dalam kehidupan. Dengan kata lain, bicara soal pendidikan adalah bicara soal kualitas kehidupan anak didik, soal kualitas sumberdaya manusia (SDM). Soal SDM ini, di abad-21 akan menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk ikutan bergulir sejajar dengan bangsa lain. Persaingan dalam bentuk barang produksi, tenaga kerja, pariwisata dll akan muncul ke permukaan. Namun, yang menjadi persoalan adalah sadarkah pemerintah atau bangsa Indonesia ini bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk menghadapi persaingan tersebut. Adakah komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menentukan bahwa sektor pendidikan adalah faktor kunci bagi pembangunan bangsa dan negara.

Bila dilihat dari komitmen pemerintah Indonesia yang menempatkan pembiayaan pendidikan hanya sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan nasional, hal ini masih dirasa kurang, sehingga perlu adanya kepedulian dari masyarakat.

---

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## **Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pendekatan Community Based Education**

### a) Peningkatan mutu pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar yang menjadi target dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Peningkatan mutu berkaitan dengan target yang harus dicapai, proses untuk mencapai, dan faktor-faktor yang terkait. Dalam peningkatan mutu ada dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian, yakni aspek kualitas hasil dan aspek proses mencapai hasil tersebut

### b) Peningkatan kualitas lulusan

Peningkatan kualitas sekolah senantiasa bermuara pada peningkatan kualitas lulusan. Disebut berkualitas manakala lulusan dapat mencapai standar yang telah ditentukan. Semakin tinggi dan melampaui standar semakin berkualitas lulusan tersebut. Sebaliknya, semakin jauh dari standar semakin rendah kualitas yang bersangkutan. Penguasaan kompetensi tersebut diukur dalam skor nilai sebagai cermin dari hasil belajar. Penentuan sasaran diikuti dengan target seberapa jauh atau seberapa tinggi sasaran tersebut dapat dicapai. Kualitas mempunyai tolak ukur yang lain selain standar kualitas.

### c) Peningkatan kualitas proses belajar mengajar

Inti dari sekolah adalah interaksi guru dan siswa, khususnya di ruang-ruang tertentu di sekolah. Kualitas proses belajar mengajar ditentukan oleh kualitas interaksi guru-siswa tersebut. Kualitas interaksi guru dan siswa ditentukan oleh status kesiapan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di satu sisi dan pada sisi lain ditentukan oleh kesiapan siswa untuk menjalani proses pembelajaran.<sup>5</sup>

Teori peningkatan mutu sekolah menekankan pada kultur sekolah dalam kerangka model The Total Quality Management (TQM). Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah mencakup tiga kemampuan, yaitu: kemampuan akademik, sosial, dan moral. Meski demikian, pada umumnya yang mendapatkan

---

<sup>5</sup> Zamroni. (2013). Manajemen Pendidikan: Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

penekanan adalah kemampuan akademik, yang dengan mudah dapat diukur untuk dievaluasi secara kuantitatif. Dua kemampuan lain belum dilaksanakan secara eksplisit, sebab terkait dengan pelaksanaan evaluasi yang tidak mudah. Menurut teori ini, mutu sekolah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Kultur sekolah merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, upacara-upacara, slogan-slogan, dan berbagai perilaku yang telah lama terbentuk di sekolah dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, baik secara sadar maupun tidak. Kultur ini diyakini memengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah, yaitu: guru, kepala sekolah, staf administrasi, siswa, dan juga orang tua siswa. Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan mendorong perilaku warga ke arah peningkatan mutu sekolah, sebaliknya kultur yang tidak kondusif akan menghambat upaya menuju peningkatan mutu sekolah. Kultur yang kondusif seperti kultur yang mendorong siapapun warga sekolah malu kalau tidak disiplin, siswa malu kalau tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya. Kondisi sebaliknya menunjukkan kultur yang tidak kondusif.

d) Pendekatan Community based education

*Community based education* adalah konsep pendidikan yang menekankan pada paradigma pendidikan dalam upaya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan global dan nasional. intinya adalah bahwa masyarakat yang menentukan kebijakan serta ikut berpartisipasi dalam menanggung beban pendidikan, bersama seluruh masyarakat setempat, tentang pendidikan yang bermutu bagi anak-anak mereka.

### **Partisipasi masyarakat**

Partisipasi menurut Huneryager dan Heckman adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka<sup>6</sup> Demikian halnya yang dinyatakan oleh Cohen dan Uphoff (1977) bahwa partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan,

---

<sup>6</sup> Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program.<sup>7</sup> Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam konteks demokrasi otonomi membutuhkan pernyataan hak-hak manusia di luar memilih untuk memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>8</sup> membagi partisipasi menjadi enam pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam erubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Rugh dan Bossert (1998:141) menyatakan bahwa masyarakat dan keluarga dapat diajak untuk berpartisipasi dalam masalah pendidikan atau berinteraksi dalam dua belas langkah berikut ini:

1. Advocating enrollment and education benefits
2. Ensuring regular students attendance and completion
3. Constructing, repairing, and improving facilities
4. Contributing in-kind labor, materials, land and funds
5. Identifying and supporting local teacher candidates

---

<sup>7</sup> Oakley, Peter. (1991). *Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development*. Geneva: ILO

<sup>8</sup> Mikkelsen, Britha. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

6. Making decisions about school location and schedules
7. Monitoring and following up teacher and students attendance
8. Forming education committees to manage schools
9. Attending school meetings to know about children's work
10. Providing skill instruction to know about children's work
11. Helping children with studying
12. Gathering more resources and solving problems through the education bureaucracy.

### **Pendekatan Sistem Sebagai Indikator Community based education**

Kalau ditinjau secara pendekatan sistem yang mempergunakan tiga aspek masukan, proses dan keluaran sebagai titik pengkristalan, maka masukan *Community based education* adalah peserta didik yang datang dari masyarakat, proses pendidikan *Community based education* terjadi di dalam masyarakat itu, dengan masukan sumberdaya dan masukan lingkungan, asalnya terutama dari masyarakat itu sendiri, serta keluarannya berlangsung di dalam masyarakat itu. Yang ditekankan dalam hal ini adalah bahwa mestinya tanggungjawab pendidikan masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat setempat adalah stakeholder utama dari pendidikan di tempat itu. Masyarakat setempat bukan hanya sebagai penonton yang kadang-kadang diundang dalam permainan. Mestinya mereka itu berhak untuk menjadi pemain, bahkan menjadi pemain utama. Itu akan lebih jelas bila dibandingkan dengan apa yang terjadi selama ini. Selama ini, pendidikan seolah-olah adalah pendidikan Pemerintah, masyarakat hanyalah klien/pelanggan belaka, ataupun dapat dikatakan konsumen pendidikan semata mata. Masyarakat kadang-kadang dilibatkan, diundang ikut dalam kegiatan pendidikan (*community involvement*), tetapi tidak berperan serta (*community participation*). Memang selama ini pendidikan dapat dikatakan semuanya terpusat. Kurikulum ditetapkan di pusat, tenaga pendidikan ditentukan dari pusat, sarana/prasarana 'diberikan' dari pusat, uangnya ditentukan dari pusat; semuanya mau diseragamkan dari pusat. Yang Terjadi adalah masyarakat jadi pasif tidak tahu dan tidak biasa berkecimpung di dalam kehidupan pendidikan anak-anak mereka. Sekolah adalah sekolahnya Pemerintah, sekolahnya guru-guru, negeri atau swasta. Yang dilematis adalah siapa yang disebut masyarakat itu. Di dalam otonomi daerah, masyarakat diberi batasan

masyarakat Kabupaten. Tetapi tentu di dalam suatu negara kesatuan masyarakat kabupaten adalah bagian dari masyarakat propinsi dan selanjutnya adalah bagian dari masyarakat negara. Bangsa Indonesia bukanlah federasi masyarakat kabupaten, jadi meskipun otonomi daerah menyebut otonomi daerah tingkat dua, itu tidaklah berarti bahwa masyarakat kabupaten terpisah dari keseluruhan masyarakat negara kesatuan. Pertanyaan sekarang di dalam *Community based education*, apakah yang menjadi tanggungjawab masyarakat setempat dan apa yang menjadi tanggungjawab masyarakat nasional?. Hal ini yang harus menjadi pergumulan bersama.

### **Tanggungjawab Pendidikan**

Dalam hal tanggungjawab dapat diperiksa kembali komponen dari sistem pendidikan. Tentu ada sistem pendidikan lokal sekolah, kursus/pelatihan, yang dapat disebut sistem institusional dan ada pula sistem pendidikan daerah tingkat dua dan selanjutnya sistem pendidikan nasional. Sayangnya sampai sekarang yang sudah ada UU-nya baru Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Dalam mewujudkan otonomi pendidikan daerah, mestinya SPN tadi dilengkapi dengan UU baru atau UU tentang Otonomi Pendidikan Daerah. Selama ini pendidikan yang diselenggarakan swasta pun, masukan-masukannya masih ditentukan dari pusat, hanya penyelenggaraannya, terutama pembiayaannya yang dipikul hampir seluruhnya oleh penyelenggara pendidikan swasta tersebut. Di sini letaknya kepelikan otonomi pendidikan dasar dan menengah itu. Ditambah lagi dengan tiga jenjang persekolahan: pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Di dalam *Community based education* seyogianya yang mengetahui kebutuhan pendidikan bagi warganya adalah masyarakat itu: berapa warganya yang harus ditampung di SD dan SLTP atau Pendidikan Dasar, berapa yang harus ditampung di pendidikan menengah, berapa yang perlu ditampung di dalam kursus-kursus dan lain sebagainya. Berapa ruang yang diperlukan dan/atau berapa gedung yang diperlukan dan di mana harus ditempatkan, berapa biaya yang diperlukan, berapa guru dan tenaga lain yang dibutuhkan seharusnya lebih diketahui oleh masyarakat setempat. Tentu untuk itu semua diperlukan data dan informasi yang akurat. Dengan demikian diperlukan selain perangkat dinas juga dibutuhkan suatu perangkat di dalam masyarakat yang menetapkan kebijakan untuk kebutuhan-kebutuhan di atas, di

samping dinas yang ditugasi untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh masyarakat.

Yang menjadi masalah paling pelik adalah tanggung jawab keuangan. Meskipun disebut otonomi pendidikan termasuk di dalam otonomi daerah tingkat dua, namun harus dikatakan bahwa pendidikan sebenarnya adalah tanggungjawab bersama sebagai bangsa. Sebagai bangsa kita bertekad untuk mengadakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi semua warga. Itu berarti tidak hanya bagi daerah/masyarakat yang mampu, tetapi juga bagi daerah yang kurang kapasitasnya untuk itu. Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme di mana yang kaya membantu yang lemah; mungkin inilah yang harus pula termasuk ke dalam perimbangan keuangan di antara pusat dan daerah. Apakah itu diatur dengan alokasi umum atau alokasi khusus.

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji penerapan *community based education* dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengkaji bentuk CBE dalam meningkatkan mutu pendidikan. Informan diambil dari lingkungan sekolah yakni guru dan orang tua murid SMK.N Batang. Penentuan subyek penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan *Community based education* ( Pendidikan berbasis masyarakat) dalam bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk disini adalah partisipasi orang tua murid. Partisipasi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan mutu sekolah. Bagi sekolah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah kenyataan obyektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subyektif orang tua siswa. Dengan demikian, partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektif dari sekolah dan orang tua dalam tujuan sekolah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh salah satu kepala sekolah bahwa :

“Partisipasi masyarakat dalam mendukung program program sekolah dan selalu memberi perhatian terhadap pendidikan anaknya.” (K. 6-8-2919)

Hal yang senada juga yang disampaikan oleh salah satu orang tua murid bahwa:

“Partisipasi merupakan kewajiban bagi orang tua untuk ikut serta dalam membantu pendidikan anak dalam belajar dan tidak sepenuhnya diserahkan kepada sekolah walaupun anak berada di sekolah sehari penuh.” ( T. 6-8-2019)

Partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi sebagai hasil tindakan dari sekolah, yaitu kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik harus dimiliki kepala sekolah dalam merencanakan, mengatur, menggerakkan, mengevaluasi, dan merencanakan kembali dengan lebih baik agar dapat mencapai tujuan sekolah. Partisipasi yang merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pengelolaan dan kepemimpinan sekolah.

Pengelolaan dan kepemimpinan kepala sekolah yang terbuka dan transparan akan mengundang apresiasi dari masyarakat khususnya orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu orang tua siswa sebagai berikut: “Sekolah sangat terbuka terhadap kedatangan orang tua, ketika saya datang ke sekolah, saya langsung disambut baik oleh warga sekolah khususnya guru. Selain itu, sangat mudah untuk menemui kepala sekolah dan respon beliau sangat positif terhadap kedatangan kami.” (T.6-8-2019) Partisipasi orang tua dan masyarakat pada sekolah memiliki beberapa bentuk. Mulai dari yang paling mendasar, (1) partisipasi dalam bentuk kerja sukarela, (2) partisipasi dalam bentuk pembiayaan, (3) partisipasi dalam bentuk pemikiran dan (4) partisipasi dalam bentuk mengambil keputusan.

Setelah diberlakukan PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, dimana sekolah tidak boleh memungut dana dari orang tua dan masyarakat. Sebab biaya pendidikan telah ditanggung oleh pemerintah melalui dana BOS baik dana BOS pusat dan BOSDA kabupaten. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sekolah bahwa “semua sekolah negeri tidak boleh memungut dana dari masyarakat dan orangtua “.

Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah no. 48 tahun 2008 yang melarang sekolah untuk memungut dana dari orang tua. Maka saya mewujudkan partisipasi orang tua dan masyarakat dengan menyumbang secara sukarela. Namun masih diperbolehkan untuk menerima sumbangan sukarela. Sumbangan tersebut bermacam-macam tidak hanya dalam bentuk finansial, dan sumbangan tersebut bisa berbentuk pelatihan bagi anak-anak, memberi pelatihan kepada anak-anak disini,

selain itu orangtua juga memberikan motivasi kepada anak-anak dengan mengisi pengajian.” (T. 6-8-2019)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa partisipasi orang tua dan masyarakat dapat berbentuk sumbangan sukarela dengan bekerja sama dalam memberikan pelatihan dan kegiatan pengajian kepada siswa-siswi.

Setelah PP no. 48 tahun 2008 diterapkan, pihak sekolah tidak berwenang mengadakan kegiatan wisata sekolah bagi siswa-siswi, maka komite sekolah yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut, sedangkan sekolah hanya bertindak sebagai fasilitator. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu orang tua murid

“Untuk membuat anak agar siap dalam menghadapi Ujian Nasional (UN), les tambahan pelajaran merupakan bentuk partisipasi orang tua dimana orang tua yang mengusulkan kepada sekolah untuk mengadakan les tambahan pelajaran bagi anak-anak mereka,.” (K. 6-8-2019 )

Partisipasi masyarakat khususnya orang tua juga dapat berbentuk fisik dan dana infaq yang bersifat tiba-tiba dan atas dasar kemauan orang tua siswa serta tanpa adanya paksaan dari sekolah. Dari infaq orangtua tersebut dapat membangun sarana pendukung seperti tangga masjid sekolah. Kepala sekolah menggerakkan partisipasi orangtua melalui infaq dan orangtua pun merespon dengan positif

Tabel 15. Persentase kelulusan Ujian Nasional SMK.N. Batang

No	Tahun Ajaran	Persentase(%)
1	2015/2016	100
2	2016/2017	100
3	2016/2017	100
4	2017/2018	100

Selain itu, prestasi-prestasi kejuaraan bidang akademik lainnya seperti LKTI, Pada bidang non-akademik, prestasi siswa yaitu pada bidang olahraga, seni dan keagamaan, seperti tari, pramuka, catur, baca puisi dan lain-lain Berbagai upaya peningkatan mutu telah banyak dilakukan, tetapi pendidikan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain yang paling krusial adalah rendahnya mutu pendidikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan perencanaan di sekolah. Sebagai

akibatnya, masyarakat kurang merasa memiliki, kurang bertanggung jawab dalam memelihara dan membina sekolah di mana anak-anaknya bersekolah.

Sedangkan partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu sekolah. Partisipasi masyarakat terhadap sekolah bertujuan untuk: (a) menyediakan sumber daya yang lebih, menjamin pemerataan dan efektifitas, (b) meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan dengan menempatkan proses sedekat mungkin dengan budaya, kondisi, kebutuhan, dan adat istiadat masyarakat setempat.

(Shaeffer, 1992) dalam Rodliyah (2013: 5)<sup>9</sup>. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat (*stakeholder*).

Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Hampir semua sekolah telah mempunyai komite sekolah yang merupakan perwakilan masyarakat dalam membantu sekolah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah mulai sadar pentingnya dukungan mereka terhadap keberhasilan belajar anak disekolah. Peran serta orang tua juga tidak hanya terbatas pada mobilitassumbangan dana saja, tetapi lebih substansial pada fungsi-fungsi manajemen di sekolah.

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dana pendidikan yang merupakan sumber daya keuangan yang disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik melalui dana BOS baik BOS pusat dan BOSDA pemerintah daerah.

Bagi sekolah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah kenyataan obyektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subyektif orang tua siswa. Dengan demikian, partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektif dari sekolah dan orang tua dalam tujuan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai bentuk tindakan dan kewajiban

---

<sup>9</sup> Rodliyah, Siti. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

bagi orang tua siswa untuk aktif mendukung program sekolah, perhatian dengan pendidikan anak, membantu dan mendukung belajar anak dan membantu sekolah menghadapi permasalahan yang terjadi di sekolah. Adapun partisipasi orang tua dan masyarakat pada sekolah memiliki beberapa bentuk. Mulai dari yang paling khusus adalah (1) partisipasi dalam bentuk kerja sukarela, (2) partisipasi dalam bentuk mengambil keputusan, (3) partisipasi dalam pemikiran dan (4) partisipasi dalam pembiayaan. Partisipasi dalam kerja sukarela, seperti orang tua dan masyarakat bekerja sama dalam memberikan pelatihan dan kegiatan pengajian kepada siswa. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam bentuk mengambil keputusan ialah dalam prosedur peningkatan mutu sekolah, tahap pertama yang dilakukan ialah merumuskan visi, misi, dan strategi sekolah. Kepala Dalam perencanaan dan pelaksanaan, peran keterlibatan komite sekolah, orang tua dan masyarakat sangat bermanfaat bagi sekolah dalam menyukseskan penyelenggaraan semua program

#### **E. KESIMPULAN**

*Community based education* sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dalam bentuk Partisipasi masyarakat. Meliputi : Partisipasi dalam bentuk kerja sukarela, yakni orang tua siswa selalu membantu kegiatan sekolah, mendukung pelaksanaan program sekolah. Partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan, yakni orang tua siswa terlibat dalam pertemuan antara sekolah dan komite sekolah dengan memberikan masukan/saran dan kritik terhadap perencanaan program sekolah. Partisipasi dalam bentuk pemikiran, yakni orang tua siswa memberi saran kepada sekolah untuk melaksanakan jam tambahan pelajaran, Partisipasi dalam pembiayaan, yakni orang tua siswa menyumbangkan iuran untuk pelaksanaan beberapa kegiatan sekolah dan dana infaq untuk sarana-prasarana sekolah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oakley, Peter. 1991. *Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development*. Geneva: ILO
- Samsul Maarif, et al., 2012, *School Culture di Madrasah dan Sekolah*, Semarang: IAIN Walisongo
- Mikkelsen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Rodliyah, Siti. 2013, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Yunita Endra Megiati. Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep dan Implementasinya *Jurnal SAP Vol. 1 No. 2 Desember 2016 ISSN: 2527-967X*

Zamroni. 2013. *Manajemen Pendidikan: Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional